



PKM PENGUATAN SISTEM ADMINISTRASI BAGI PERANGKAT KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON

Oleh

Sisca B. Kairupan¹, Marthinus Mandagi², Margareth Rantung³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado

Email: ¹siscakairupan@unima.ac.id, ²marthinusmandagi@unima.ac.id,

³margarethrantung@unima.ac.id

Article History:

Received: 12-09-2023

Revised: 04-10-2023

Accepted: 23-10-2023

Keywords:

PKM, Penguatan

Administrasi

Kelurahan, PKK Kota

Tomohon

Abstract: Tujuan dari pengabdian ini adalah; 1). Adanya pertukaran pengalaman dan ilmu mengenai sistem administrasi yang dilaksanakan di Kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur antara Ibu-Ibu PKK tim dosen PKM juga pegawai kelurahan; 2). Membekali gambaran mengenai pentingnya tata kelola yang ideal dalam pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan yang berada di kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur serta agar dapat memberikan masukan (saran) terkait perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah: 1). Partisipasi Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Kota Tomohon Timur yang masih minim dalam penguatan administrasi yang diberlakukan di kelurahan setempat; 2). Kapasitas pengetahuan Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Kota Tomohon Timur mengenai tata kelola administrasi dan alur pengadministrasian dalam pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan oleh Kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur

PENDAHULUAN

Desentralisasi membawa implikasi perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan diantaranya pelayanan publik. utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan lokal [1]. Dalam perspektif pelayanan sektor publik, pemerintah perlu bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam usaha mensejahterakan masyarakat dan tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya, untuk menghasilkan pemerintahan yang mampu menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu maka konsep Dynamic Government diperlukan [2]. Managing governance atau tata kelola pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu kajian yang menarik untuk dibahas dalam perkembangan saat ini. Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kemudian ke tingkat desa menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pejabat untuk merespons masyarakat. Kondisi ini membutuhkan pemahaman tentang pemerintahan yang ideal dan tepat dalam menghadapi permasalahan yang ada [3].

Sebagai lembaga utama yang melayani masyarakat, kelurahan harus mampu memberikan kepuasan masyarakat. Tata kelola dalam arti sempit mengacu pada proses



korespondensi, pengarsipan dan akuntansi, tetapi model ini telah lama ditinggalkan.

Saat ini, tata kelola berkaitan erat dengan konsep manajemen, yaitu dua orang atau lebih yang diorganisasikan bersama menjadi satu kesatuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan [4]. Pengembangan sistem administrasi publik saat ini tidak hanya membutuhkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga mengupayakan sinergi yang lebih besar, terutama dalam hal manajemen [5]. Sinergi ini merupakan syarat penting untuk menerapkan sistem pemerintahan yang ideal. Sebab, sistem pemerintahan pusat, daerah dan daerah perlu bekerja dan berinteraksi secara bersama-sama agar permasalahan dapat cepat terselesaikan. Dalam dinamika saat ini, sering terjadi perbedaan persepsi tentang birokrasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Kondisi inilah yang menjadi dasar ketertarikan kami untuk saling bertukar ilmu dan bertukar pendapat serta pemikiran tentang pengelolaan sistem administrasi yang ada di kelurahan [6].

Kecamatan Tomohon Timur berada di Kota Tomohon dengan berbagai macam keberagaman yang kompleksitas masalah dikarenakan Kota Tomohon merupakan pusat wisata, perdagangan dan juga pendidikan. Hal ini ditambah dengan banyaknya tempat wisata, kos-kosan dan kontrakan di sekitar Kecamatan Tomohon Timur dikarenakan terdapat beberapa Universitas, Perguruan Tinggi dan juga Akademi sehingga banyak pendatang dari luar Kota Tomohon yang menghuni di wilayah tersebut. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja administrasi pemerintahan dari kelurahan panjer dalam melayani dan mengatur masyarakat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis dapat melakukan identifikasi masalah dalam kegiatan partisipasi Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Kota Tomohon Timur yang masih minim dalam penguatan administrasi yang diberlakukan di kelurahan setempat. Dan kapasitas pengetahuan Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Kota Tomohon Timur mengenai tata kelola administrasi dan alur pengadministrasian dalam pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan oleh Kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur.

Adapun tujuan lanjutan dari kegiatan tersebut diantaranya :

1. Saling bertukar pengalaman dan ilmu mengenai sistem administrasi yang dilaksanakan di Kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur antara Ibu-Ibu PKK tim dosen PKM juga pegawai kelurahan.
2. Membekali gambaran mengenai pentingnya tata kelola yang ideal dalam pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan yang berada di kelurahan se-Kecamatan Tomohon Timur serta agar dapat memberikan masukan (saran) terkait perbaikan tata kelola administrasi pemerintahan.

METODE

Metode Pelaksanaan Metode kegiatan pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan praktek.

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis pengadministrasian di beberapa kelurahan di Kecamatan Tomohon Timur.

2. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan penjelasan kepada peserta tentang



materi terkait teori, konsep dan jenis pelayanan administrasi di kelurahan.

3. Tanya Jawab dan Diskusi

Metode tanya jawab dilakukan untuk menggali persoalan yang berhubungan dengan materi ceramah. Selain itu juga terkait kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi pengelola arsip keluarga di masyarakat. Serta pemberian solusi untuk menyelesaikan masalah yang sering dihadapi

4. Praktek Penyimpanan

Praktek penyimpanan arsip keluarga dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah diperoleh sehingga informasi teori yang diperoleh dapat dipraktekkan secara langsung tata kelola dan alur berbagai pelayanan di kelurahan.

5. Pendampingan

Pendampingan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan pendampingan pasca pelatihan. Pendampingan pada saat kegiatan berlangsung dilakukan untuk mengetahui dan membantu kesulitan yang dialami peserta. Pendampingan pasca pelatihan dimaksudkan untuk memberikan arahan dan membimbing dalam rangka penguatan sistem administrasi di kelurahan bagi peserta setelah dilakukan pelatihan. Panitia KM menerima pertanyaan dan konsultasi terkait permasalahan yang terjadi dalam implementasi teori dan praktek yang melalui media telepon dan pesan singkat.

6. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.

7. Evaluasi

Evaluasi dilakukan pada saat proses pelatihan berlangsung. Evaluasi saat proses praktek akan memudahkan pendamping (dosen) untuk memberikan pendampingan agar peserta dapat melakukan pengelolaan arsip dengan baik. Evaluasi proses dilakukan agar dapat langsung mengetahui kesulitan yang dialami peserta.

HASIL

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan manusia yang dipekerjakan di antaranya sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan itu. Di suatu Kecamatan tentunya berusaha untuk melakukan secara maksimal pekerjaannya. Tentunya dapat dilihat dari bagaimana memaksimalkan setiap kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pelayanan yang baik.

Namun kekurangan sumber daya untuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan tetap dirasakan oleh masyarakat yang sedang melakukan pelayanan. Karena jika Petugas pelayanan di Kecamatan kurang dalam bertugas petugas akan bekerja kejar sana kejar sini. Memang pekerjaan yang menjadi tugas dari satu pegawai selesai tapi terkadang membutuhkan tambahan waktu diluar jam kerja." Keterbatasan sumber daya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan. Dalam hal itu Masyarakat merasakan empati jika melihat pegawai banyak pekerjaan. Menurut Martani dan Lubis (1987, p. 55) sumber



daya menjadi kekuatan utama dalam menghasilkan efektivitas pelayanan publik. Berdasarkan terori tersebut pemerintah Kecamatan harus menambah sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Keberadaan Sumber Daya Manusia sebagai dukungan terhadap pelayanan kecamatan masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sumber daya manusia merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari rangkaian kelembagaan, karena lembaga menjadi kuat bilah didukung oleh sumberdaya manusia yang kuat dan bekerja efektif dan profesionalisme. Kebanyakan keluhan warga masyarakat yang selama ini dilayani oleh kecamatan seringkali berputar-putar pada isu intransparansi dan akuntabilitas yang rendah atas dana pungutan yang ditarik pada saat warga mengurus segala macam di kecamatan. Sistem perencanaan SDM yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang, merupakan tuntutan berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kecamatan bisa diandalkan bila diisi oleh aparat dengan SDM yang terencana dengan baik. Sementara itu dalam hasil penelitian untuk jumlah staf dalam mendukung jalannya pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan beban kerja khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan sarana. Wewenang dan tanggungjawab juga telah secara tegas dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi yang ada serta didukung oleh standart operasional prosedural yang berlaku perlu untuk diikutsertakan dengan ketersediaan fasilitas. Kurangnya fasilitas kerja menjadikan kelembagaan pemerintahan Kecamatan mengalami kendala. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Nellis Rodinelli dan Cheema bahwa Kelembagaan menjadi kuat bilah didukung oleh adanya Sumber daya Manusia yang profesional yang bekerja secara optimal. Sebab kelembagaan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang. Oleh karenanya ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber daya manusia yaitu jumlah staf yang memadai secara kuantitas maupun cakap secara kualitas ketrampilannya dalam melaksanakan instruksi-instruksi kebijakan dilapangan melalui keahlian latihan dan Motivasi

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan adalah sebagai inventaris kecamatan guna memaksimalkan pelayanan yang ada. Salah satunya adalah komputer yang tentunya harus memadai. Berdasarkan teori Martani dan Lubis (1987, p. 55) sarana prasarana merupakan pendekatan sumber yang menjadi hal utama untuk memaksimalkan pelayanan. Hasil yang didapatkan Kecamatan nantinya telah sesuai dengan teori yang ada yang menyebutkan jika sarana dan prasarana harus diberikan secara maksimal untuk memberikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Yang tentunya apapun yang ada yaitu seluruh sarana dan prasarana yang ada nantinya dicatat sebagai asset Kecamatan termasuk didalamnya Sarana dan Prasarana untuk penunjang pelaksanaan. Jika memperhatikan standar minimum, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang terlaksananya sudah memadai. Namun demikian terdapat beberapa barang dan peralatan yang sudah mesti diperbaharui ataupun ditambah. Sejak disediakannya fasilitas untuk itu perlu di sediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan pelayanan publik yang baik

Pengawasan

Earl Strong dalam Hasibuan (2006) mendefinisikan pengawasan/pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor, agar sesuai dengan ketentuan-ketetapan dalam rencana.



Koontz dalam Manullang (2014) mendefinisikan pengawasan/pengendalian sebagai pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat terselenggara. Richard Daft dan Norman Macintosh dalam

Stoner dan Wankel (2000) mendefinisikan pengawasan (controlling) adalah proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Lanjut dikatakan, proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. menurut Stoner dan Wankel (2000) bahwa pengawasan kemudi (steering control) adalah yang paling penting dan paling efektif. Kegiatan dari pengawasan kemudi ini mencakup :

1. Penetapan hasil-hasil yang diinginkan,
2. Penetapan prediktor atas hasil-hasil,
3. Penetapan standar bagi prediktor dan hasil-hasil,
4. Penetapan jaringan informasi dan umpan balik, dan
5. penilaian informasi dan pengambilan tindakan perbaikan.

KESIMPULAN

Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan disimpulkan dapat lebih spesifik yaitu dengan adanya Ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana sudah mendukung penerapan pelayanan di Kecamatan, Mekanisme proses yang ada sudah mendukung penerapan pelayanan, Pencapaian tujuan penerapan pelayanan adalah memberikan waktu yang sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat Memberikan rekomendasi terhadap upaya peningkatan efektivitas penerapan di Kecamatan seperti adanya sosialisasi aturan dan SOP yang dijelaskan kepada masyarakat sehingga perbaikan tersebut dapat meningkatkan efektivitas yang ada di Kecamatan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. K. Azhari and A. H. S. Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang: Intrans Publishing, 2019, 2019.
- [2] A. R. Dilapanga, J. Mantiri, R. A. Mege, E. E. Masengi, and A. L. Lonto, "Effectiveness of The Implementation of Compulsory Primary Education Policy in Bolaang Mongondow District North Sulawesi Province," 2020.
- [3] H. Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2011.
- [4] Syafie, "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa," J. Pengabd. Kpd. Masy. (Indonesian J. Community Engag., vol. 4, no. 1, p. 76, 2006.
- [5] Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik. 2011.
- [6] L. Safroni, Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Surabaya: Aditya Media Publishing, 2012.
- [7] Louise, D. (2019). Post-New Public Management (NPM) and the Reconfiguration of Health Services in England. 1–3. <https://doi.org/10.4000/osb.1714>
- [8] Lufunyo, H. (2018). Impact of public sector reforms on service delivery in Tanzania. Journal of Public Administration and Policy Research, 5(2), 26–49.



<https://doi.org/10.5897/jpapr12.014>

- [9] Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Heribertus, A. P. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). BPFE. Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Andi.
- [10] Martani, H., & Lubis, H. (1987). Teori Organisasi. Jakarta : Pusat antar Univesitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- [11] Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya. Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung:
- [12] Alfabeta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (3)